

**PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
TANAH BUMBU**

Yudi Rahman, Asruni, Yola. R

Abstrak : Yudi. Rahman dkk. 2021. Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, (2) mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dan (3) mengetahui dan menganalisis pengaruh dominan diantara variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian korelasional. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan sumber data adalah sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2013-2020. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*. Sampel yang diambil adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) selama tahun 2013-2020 berupa pengeluaran pemerintah daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung serta laporan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD. Secara parsial belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD. Belanja tidak langsung merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD

Kata Kunci: *Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Kinerja Keuangan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2017:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya.

Mengacu kepada Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (pasal 1 ayat 9). Struktur APBD secara garis besar terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen besar dalam APBD tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan

Hal yang melatar belakangi penulis untuk meneliti masalah belanja adalah

karena ada tendensi di pemerintah daerah membuat anggaran belanja kurang memperhatikan *output* dan *outcome* serta dampak belanja itu sendiri terhadap masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah dalam menyusun belanja yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Dinas/Badan/Kantor seperti berlomba-lomba membuat anggaran belanja, mencari jalan bagaimana agar mendapatkan alokasi belanja yang lebih besar, sedangkan program atau kegiatan yang didanai

Permasalahan yang terjadi pada Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah penyerapan anggaran untuk komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung belum mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu masih belum maksimal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2016 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hanya mencapai 79,59% dan belanja langsung sebesar 83,01%. Sedangkan pada tahun 2017 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hanya mencapai 86,88% dan belanja langsung sebesar 87,47%. Selanjutnya pada tahun 2018 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hanya mencapai 95,56% dan belanja langsung sebesar 75,78%. Pada tahun 2019 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hanya mencapai 93,01% dan belanja langsung sebesar 80,24%. Pada tahun 2020 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hanya mencapai 93,46% dan belanja langsung sebesar 93,69%.

Besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016-2020

Thn	Belanja Tidak Langsung		%
	Anggaran	Realisasi	
2016	13.478.304.85	13.084.478.90	96,89
2017	10.769.127.69	10.133.814.64	94,10
2018	24.114.755.67	23.045.159.58	95,56
2019	24.617.716.03	22.897.386.51	93,01
2020	25.191.507.21	23.774.056.81	94,37

Sumber: Sek DPRD Kab Tanah Bumbu

Tabel 1.2

**Belanja Langsung Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2016-2020**

Thn	Belanja Langsung		%
	Anggaran	Realisasi	
2016	36.893.248.522	27.130.653.953	96,89
2017	29.096.752.022	27.043.405.631	94,10
2018	36.842.590.500	33.883.754.292	95,56
2019	51.325.531.593	41.184.774.853	93,01
2020	45.287.247.933	42.038.542.875	94,37

Sumber: Sek DPRD Kab Tanah Bumbu, 2021

Variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah belanja langsung, belanja tidak langsung dan kinerja keuangan daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja pegawai dipilih berdasarkan sisi pemerintah daerah dimana sebagai pelaksana atau pelaku kebijakan yaitu pegawai serta pejabat itu sendiri. Belanja barang dan jasa diambil berdasarkan belanja aset dan belanja jasa. Belanja modal diambil berdasarkan asumsi sisi belanja yang memihak pada kepentingan publik. Pengaruh kedua belanja tersebut dihubungkan dengan kinerja keuangan daerah. Dengan mengetahui pengaruh kedua jenis belanja tersebut terhadap kinerja keuangan daerah, maka diharapkan ditemukan alokasi belanja yang paling ideal di masa mendatang, di mana tercipta suatu harmonisasi atau keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu sendiri. Dengan pemberian gaji dan penghasilan yang sesuai dan layak kepada pegawai negeri sipil diimbangi dengan peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat juga mendapatkan kepuasan yang maksimal atas pelayanan pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasana publik yang bermutu, yang secara umum meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam arti luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu”**.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Variabel manakah diantara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu?

Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2020.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial belanja langsung

dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dominan diantara variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademik
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman secara langsung dalam pelaksanaan penelitian, serta dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan penelitian selanjutnya serta se-bagai bahan

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2016:329) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Menurut Halim (2017: 208) kinerja keuangan merupakan kemampuan organisasi/perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan. Menurut Bastian (2016: 275), pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan pencapaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan di masa

referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi Keuangan, khususnya belanja langsung, belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang sehubungan dengan kinerja keuangan dilihat dari sudut pandang belanja langsung dan belanja tidak langsung.

mendatang.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2017: 121). Masyarakat tentunya tidak mau terus-menerus ditarik pungutan, sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini menurut Halim (2017: 124) selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

- Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2017:127-130).

Perhitungan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio. Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

- Rasio Kemandirian**
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Faud, 2016: 134).

Menurut Halim (2017:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata didalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

- Rasio Efektivitas**
Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2017:129-130).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Untuk lebih jelasnya menurut Halim (2017:130) dapat ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Kurang dari 100% ($x < 100\%$) adalah tidak efisien.
 - 2) Sama dengan 100% ($x = 100\%$) adalah efisien berimbang.
 - 3) Lebih dari 100% ($x > 100\%$) adalah efektif.
- c. Rasio Efisiensi
- Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Faud, 2016: 135).
- Rasio Efisiensi =
- $$\frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\%$$
- d. Desentralisasi Fiskal
- Desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu (Halim, 2017:129-130):
- Desentralisasi Fiskal =
- $$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$
- Berdasarkan kriteria yang dibuat maka kriteria derajat desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) 0,00% s/d 10% : sangat kurang
 - 2) 10,1% s/d 20% : kurang
 - 3) 20,1% s/d 30% : cukup.
 - 4) 30,1% s/d 40% : baik
 - 5) 40,1% s/d 50% : sangat baik
 - 6) > 50% : memuaskan
- e. Pertumbuhan PAD
- Tingkat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan asli daerah merupakan ukuran seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2017 : 135). Rasio pertumbuhan PAD (Halim, 2017: 130) dapat diukur dengan membandingkan selisih komponen pendapatan terhadap komponen pendapatan periode sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100\%$$

f. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja langsung. Perhitungan rasio aktivitas dapat diukur dengan membandingkan total belanja langsung atau belanja tidak langsung terhadap total APBD (Halim, 2017: 131).

$$\text{Aktivitas 1} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Aktivitas 2} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi karena rasio ini mampu mewakili perhitungan dari kinerja keuangan. Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\%$$

Belanja Langsung

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari satu kegiatan.

Menurut jenisnya, belanja langsung menurut Halim (2017: 74) meliputi:

1. Belanja pegawai, merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Belanja modal, merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Indikator belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja langsung dalam penelitian dihitung berdasarkan persentase penggunaan belanja suatu instansi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Belanja Langsung} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Belanja Tidak Langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Menurut jenisnya, belanja tidak langsung menurut Halim (2017: 76) meliputi:

1. Belanja pegawai dan bunga,
2. Subsidi,
3. Hibah,
4. Bantuan sosial,
5. Belanja bagi hasil,
6. Bantuan keuangan,
7. Belanja tidak terduga.

Belanja tidak langsung adalah belanja pemerintah yang secara tidak langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Indikator belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja tidak langsung dalam penelitian dihitung berdasarkan persentase penggunaan belanja suatu instansi .

Pegelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Halim (2017: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang

inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (Darise, 2016: 25).

Penelitian Terdahulu

1. Astiti dan Mimba. (2015). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam laporan keuangan. Dewasa ini keefektifan pengalokasian belanja daerah masih dikatakan belum tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan di Provinsi Bali dengan lingkup delapan kabupaten dan satu kota dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2009-2013. Sumber data penelitian yaitu berupa data sekunder dari Biro Keuangan Provinsi Bali. Hipotesis diuji dalam penelitian ini dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil analisis,

diperoleh hasil belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independensi, belanja rutin dan belanja modal mampu memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 22,3%, sedangkan sisanya 77,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

2. Asnidar dan Hardi. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa belanja modal dan kinerja keuangan yang dihitung dari Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah tahun 2007-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi linier sederhana, uji t, uji koefisien determinasi (R^2). Hasil persamaan diperoleh $Y = 99,63 + 9,79X$. Berdasarkan nilai konstanta sebesar 99,63 maka kinerja keuangan di Kota Langsa bernilai positif sebelum dipengaruhi oleh belanja modal. Koefisien regresi sebesar 9,79 menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa dan jika belanja modal meningkat 1% maka kinerja keuangan Kota Langsa akan meningkat sebesar 9,79%. Hasil uji t diperoleh nilai prob t statistik $< 5\%$ ($0,01 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,503 atau sebesar 50,3% variabel belanja modal memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Langsa, sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

3. Ariwibowo. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah

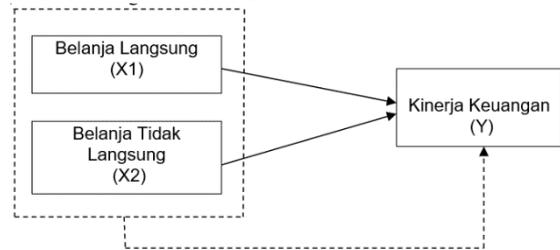
Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus karena semua populasi dijadikan sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan: dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji selisih mutlak. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013. 2) Ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013. 3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013. 4) Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya. 5) Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini

digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1: Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- > Pengaruh parsial
 - - - - -> Pengaruh simultan

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka selanjutnya akan dapat diuraikan hipotesis penelitian ini, yaitu:

- H₁: Diduga belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
 H₂: Diduga belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
 H₃: Diduga belanja tidak langsung merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional. Jenis korelasional dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Kuncoro, 2017:16). Hubungan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari variabel independen (pertumbuhan ekonomi) dan variabel dependen (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung (X_1)

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Indikator belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dasar perhitungan belanja langsung adalah:

2. Belanja Tidak Langsung (X_2)

Belanja tidak langsung adalah belanja pemerintah yang secara tidak langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Indikator belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil.

3. Kinerja Keuangan (Y)

Variabel kinerja keuangan merupakan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.. Menurut Faud (2016: 135) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018: 61). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2013-2020 berupa pengeluaran pemerintah daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung serta laporan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Sampel

Menurut Sekaran (2016:123), sampel adalah sebagian dari populasi, terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Hasan, 2017). Pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) selama tahun 2013-2020 berupa pengeluaran pemerintah daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung serta laporan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Umar (2017:36) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh yang terdapat dalam laporan keuangan. Data kuantitatif diperoleh melalui laporan keuangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 yang di dalamnya terdapat laporan belanja langsung dan tidak langsung serta laporan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama (Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu) yang dijadikan objek penelitian. Data yang digunakan bersumber pada Laporan Realisasi APBD tahun 2016-2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Data sekunder berupa data *time series* meliputi pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja langsung dan

belanja tidak langsung per triwulan selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 serta data kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala numerik dan merupakan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dokumentasi).

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat hasil grafik histogram maupun grafik normal plot atau dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test (Ghozali, 2016: 252). Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini penulis melihat hasil grafik histogram maupun grafik normal plot. Menurut Ghozali (2016: 147), distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang dibangun ada korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika antar variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal.

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen = 0. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinieritas di dalam model regresi dapat digunakan tiga cara, menurut Ghozali (2016: 91) yaitu:

- 1) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya Multikolinieritas.
- 2) Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu melihat nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai toleransi mendekati 1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu (karena residual) pada periode t dengan periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (*DW test*) (Ghozali, 2016). Menurut Santoso (2018:62) deteksi adanya autokorelasi secara umum bisa diambil patokan :

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif.
- 2) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Analisis regresi linier berganda

Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang telah disajikan, maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Y = Kinerja Keuangan (%)
 a = Konstanta
 b_1 = Koefisien regresi belanja langsung,
 b_2 = Koefisien regresi belanja tidak

Pengujian Hipotesis (Uji F dan Uji t)

1. Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji kebenaran hipotesis simultan digunakan uji F

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$

$H_a :$

Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan F_{hitung} (F_h) dengan F_{tabel} (F_t) pada $\alpha = 0,05$

a. $F_h \geq F_t$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat).

2. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji kebenaran hipotesis parsial langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan koefisien regresi (b_j) yang paling besar,

$H_0 : b_i = 0$

$H_a : b_i \neq 0$

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan t_{hitung} (t_h) dengan t_{tabel} (t_t) pada $\alpha = 0,05$. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:

a. $t_h \geq t_t$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel terikat) dan terdapat pengaruh diantara keempat variabel yang diuji

b. $t_h < t_t$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel terikat) dan terdapat pengaruh diantara keempat variabel yang diuji.

3. Pengujian variabel dominan

Uji dominan dilakukan dengan menggunakan uji t (hipotesis 3), yaitu dengan melihat nilai standar koefisien beta. Jika nilai standar koefisien beta

langsung

X_1 = Belanja Langsung (%)

X_2 = Belanja Tidak Langsung (%)

e = Faktor gangguan

yaitu untuk menguji keberartian regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

$b_1 =$

$b_2 \neq 0$

apabila hasil perhitungannya menunjukkan:

b. $F_h < F_t$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat). selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial melalui uji t. Adapun rumusan hipotesis dengan menggunakan Uji t adalah sebagai berikut:

mempunyai nilai paling besar di antara masing-masing variabel independen (belanja langsung dan tidak langsung) maka variabel tersebut adalah variabel yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari

kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong kinerja keuangan.

Pengeluaran pembangunan atau belanja tidak langsung dan pengeluaran rutin atau belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2010-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Pengeluaran belanja langsung yang digunakan untuk kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1 Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kab Tanah Bumbu Per Triwulan Tahun 2013-2020

Tahun	Triwulan	Belanja Langsung (Rp)	Rasio (%)
2013		20.645.124.133	
	TW I	5.161.281.033	68,61
	TW II	4.865.724.100	63,77
	TW III	5.234.687.211	70,28
	TW IV	5.383.431.789	71,88
2014		23.467.456.712	
	TW I	5.866.864.178	68,77
	TW II	5.214.789.546	70,95
	TW III	6.102.345.610	70,93
	TW IV	6.283.457.378	65,17
2015		26.457.658.525	
	TW I	6.614.414.631	67,97
	TW II	6.100.238.790	63,83
	TW III	6.846.479.800	69,62
	TW IV	6.896.525.304	70,36
2016		27.130.653.953	
	TW I	6.782.663.488	67,46

	TW II	5.697.821.864	64,66
	TW III	6.245.654.710	68,56
	TW IV	8.404.513.891	68,67
		27.043.405.631	
2017	TW I	6.760.851.408	72,74
	TW II	7.564.235.711	72,66
	TW III	6.146.875.312	75,44
	TW IV	6.571.443.200	70,47
		33.883.754.292	
2018	TW I	8.470.938.573	59,52
	TW II	7.654.980.322	60,37
	TW III	8.654.792.741	59,05
	TW IV	9.103.042.656	59,26
		41.184.774.853	
2019	TW I	10.296.193.713	64,27
	TW II	11.002.341.683	66,83
	TW III	9.412.367.854	61,06
	TW IV	10.473.871.603	64,72
		42.038.542.875	
2020	TW I	10.509.635.719	63,88
	TW II	11.123.540.021	63,69
	TW III	10.462.712.311	65,05
	TW IV	9.942.654.824	62,89

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2013-2020 mengalami kenaikan. Sedangkan rasio rata-rata belanja langsung dari total belanja di atas 50%, berarti anggaran belanja yang disediakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu lebih dominan diperuntukkan untuk belanja langsung.

2. Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Pengeluaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Belanja Tidak Langsung Per Triwulan Tahun 2013-2020

Tahun	Triwulan	Belanja Tidak Langsung	Rasio (%)
2013		9.445.794.214	
	TW I	2.361.448.554	31,39
	TW II	2.764.900.541	36,23
	TW III	2.213.432.465	29,72
	TW IV	2.106.012.654	28,12
2014		10.657.846.987	
	TW I	2.664.461.747	31,23
	TW II	2.134.687.654	29,05
	TW III	2.500.679.452	29,07
	TW IV	3.358.018.134	34,33
2015		12.465.789.465	
	TW I	3.116.447.366	32,03
	TW II	3.456.456.873	36,17
	TW III	2.987.132.455	30,38
	TW IV	2.905.752.771	29,64
2016		13.084.478.905	
	TW I	3.271.119.726	32,54
	TW II	3.114.560.210	35,34
	TW III	2.864.100.254	31,44
	TW IV	3.834.698.715	31,33
2017		10.133.814.647	
	TW I	2.533.453.662	27,26
	TW II	2.845.687.400	27,34
	TW III	2.001.564.732	24,56
	TW IV	2.753.108.853	29,53
2018		23.045.159.584	
	TW I	5.761.289.896	40,48
	TW II	5.024.164.572	39,63
	TW III	6.001.324.789	42,95
	TW IV	6.258.380.327	40,74
2019		22.897.386.512	
	TW I	5.724.346.628	35,73
	TW II	5.461.238.911	33,17
	TW III	6.002.301.461	38,94
	TW IV	5.709.499.512	35,28
2020		23.774.056.816	
	TW I	5.943.514.204	36,12
	TW II	6.341.560.111	36,31

	TW III	5.621.489.720	34,95
	TW IV	5.867.492.781	37,11

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah belanja tidak langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2013-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan rasio rata-rata belanja tidak langsung dari total belanja di bawah 50%, berarti anggaran belanja yang disediakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu lebih sedikit diperuntukkan untuk belanja tidak langsung.

3. Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Kinerja Keuangan Per Triwulan Tahun 2013-2020

Tahun	Triwulan	Total Belanja (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan (%)
2013		30.090.918.347	39.658.746.542	
	TW I	7.522.729.587	10.876.883.218	69,16
	TW II	7.630.624.641	9.914.686.636	86,96
	TW III	7.448.119.676	9.421.564.244	79,05
	TW IV	7.489.444.443	9.445.612.444	79,29

20 14		34.125.30 3.699	42.567.8 94.556	
	TW I	8.531.325. 925	10.641.9 73.639	80,17
	TW II	7.349.477. 200	9.987.64 5.540	73,59
	TW III	8.603.025. 062	10.546.7 81.354	81,57
	TW IV	9.641.475. 512	11.391.4 94.023	84,64
20 15		38.923.44 7.990	46.870.1 30.241	
	TW I	9.730.861. 997	11.717.5 32.560	83,05
	TW II	9.556.695. 663	12.000.1 68.475	89,64
	TW III	9.833.612. 255	11.975.4 12.540	82,12
	TW IV	9.802.278. 075	11.177.0 16.666	72,70
20 16		40.215.13 2.858	50.371.5 53.373	
	TW I	10.053.78 3.214	12.465.8 88.342	80,65
	TW II	8.812.382. 074	11.342.6 58.791	87,69
	TW III	9.109.754. 964	11.796.4 58.633	77,22
	TW IV	12.239.21 2.606	14.766.5 47.607	82,88
20 17		37.177.22 0.278	39.865.8 79.715	
	TW I	9.294.305. 070	9.966.46 9.929	87,26
	TW II	10.409.92 3.111	11.075.4 21.340	83,99
	TW III	8.148.440. 044	9.023.45 6.822	90,30
	TW IV	9.324.552. 053	9.800.53 1.624	78,14
20 18		56.928.91 3.876	60.957.3 46.176	
	TW I	14.232.22 8.469	15.239.3 36.544	93,39
	TW II	12.679.14 4.894	13.411.5 46.722	94,54
	TW III	14.656.11 7.530	15.362.4 12.740	95,40
	TW IV	15.361.42 2.983	16.944.0 50.170	95,66
20 19		64.082.16 1.365	75.943.2 47.629	
	TW I	16.020.54 0.341	18.446.5 87.102	86,85
	TW II	16.463.58 0.594	19.985.8 11.907	82,38
	TW III	15.414.66 9.315	18.456.1 78.941	93,52
	TW IV	16.183.37 1.115	19.054.6 69.679	84,93
		65.812.59 9.691	70.478.7 55.152	

20 20	TW I	16.453.14 9.923	17.619.6 88.788	93,38
	TW II	17.465.10 0.132	18.342.5 41.654	95,22
	TW III	16.084.20 2.031	17.894.4 65.520	89,88
	TW IV	15.810.14 7.605	16.622.0 59.190	95,12

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2013-2020 sangat baik dimana rata-rata rasio keuangannya di atas 85%. Perkembangan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu seperti terlihat pada diagram dibawah ini.

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan betul-betul terbebas dari adanya gejala multikolinieritas, gejala autokorelasi, gejala dan gejala normalitas, maka untuk mendeteksi gejala-gejala tersebut dilakukan dengan:

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2016:95). Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya Multikolinieritas. Selain itu, melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai toleransi tidak kurang dari 0,1 dan

nilai VIF tidak lebih dari 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5 berikut ini.

Tabel 4.4

Koefisien Korelasi Antar Variabel BebasModel	BTL	BL
Correlations BTL	1.000	.734
BL	.734	1.000
Covariances BTL	.083	.064
BL	.064	.092

Sumber: Data diolah kembali, 2021
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa variabel belanja langsung mempunyai korelasi sebesar 0,734 atau 73,4% dengan variabel belanja tidak langsung, korelasi ini masih di bawah 90% sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 4.5

Analisis Tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF)

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Belanja Langsung	0.461	2.168	Non-multikolinieritas
Belanja Tidak Langsung	0.461	2.168	Non-multikolinieritas

Sumber: Data diolah kembali, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10 atau 10%. Berarti dapat disimpulkan

Analisis grafik di atas memperlihatkan tampilan grafik histogram dapat diambil kesimpulan

bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal.

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi dalam penelitian ini.

2. Uji Autokorelasi

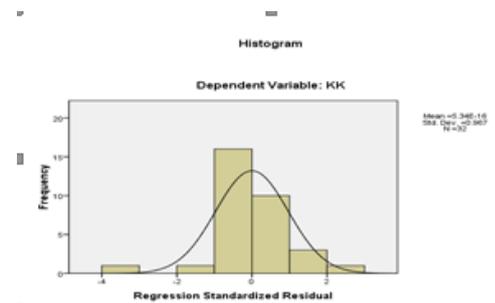
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan *Durbin Watson Test*. Ketentuan, jika nilai uji Durbin-Watson berada di antara -2 sampai dengan +2 menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi (Santoso, 2018: 62). Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,272 seperti terlihat pada tabel 4.6. Berarti dalam penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi, sehingga model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan

Tabel 4.6

Durbin Watson Test

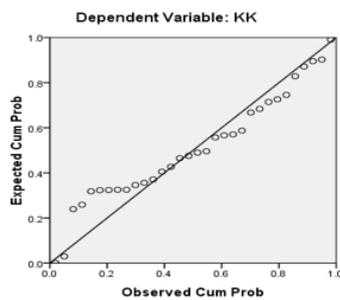
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.759 ^a	.577	.548	4.84650	1.272

Sumber: Data diolah kembali, 2021
Uji Normalitas Data Uji Normalitas ditampilkan pada gambar 4.6 dan 4.7 berikut:



Gambar 4.6: Diagram Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.7: Diagram Normal P-P Plot

Sumber : Diolah kembali, 2021 Pada grafik normal plot di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, hal ini berarti model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi kinerja keuangan berdasarkan masukan kedua variabel independen yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung karena sudah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Regresi Berganda

Analisis pengaruh belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 22 sebagai berikut

Tabel 4.8

Hasil Regresi Berganda

Variabel dependen	Koefisien Regresi	Koefisien Beta	t statistik	Sig.
Konstanta	-24.524			
Belanja Langsung	0.823	0.484	2.720	0.011
Belanja Tidak Langsung	1.681	1.040	5.845	0.000
$R^2 = 0,759$ $F\text{-statistik} = 19,755$ $R\text{ Square} = 0,577$ $Prob. = 0,000$ $n = 32$				

Sumber: Data diolah kembali, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa koefisien variabel bebas yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, artinya setiap kenaikan belanja langsung dan belanja tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil analisis regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -24,524 + 0,823.X1 + 1,681.X2$

Konstanta (a) = -24,524 menunjukkan besarnya kinerja keuangan jika belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah konstan, Model regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan belanja langsung akan diikuti kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,823 dan kenaikan belanja tidak langsung satu satuan akan diikuti kenaikan kinerja keuangan sebesar 1,681.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil uji hipotesis secara simultan

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari hasil uji F yang tertera pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	928.014	2	464.007	19.755	0.000 ^a
Residual	681.168	29	23.489		
Total	1609.182	31			

Sumber : Data diolah kembali, 2021

Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan) di atas, diperoleh F_{hitung} sebesar 19,755 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka hipotesis pertama diterima atau H_a diterima dan H_0 ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan

belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu secara statistik dapat diterima.

2. Hasil uji hipotesis secara parsial

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil uji secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Variabel	t_{hitung}	Sig.t	Keterangan
Belanja Langsung	2.720	0.011	Signifikan
Belanja Tidak Langsung	5.845	0.000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh belanja langsung terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh t_{hitung} sebesar 2,720 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya $0,011 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima dan H_0 ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial belanja langsung berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu secara statistik dapat diterima.

Koefisien korelasi variabel belanja langsung mempunyai nilai positif sebesar 0,823, artinya semakin tinggi belanja langsung maka kinerja keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu akan naik dan sebaliknya. Kenaikan belanja langsung sebesar satu rupiah memberikan pengaruh terhadap kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,823 persen. Sebaliknya, menurunnya belanja langsung sebesar satu rupiah memberikan pengaruh terhadap turunnya kinerja keuangan sebesar 0,823 persen. Sedangkan besarnya pengaruh variabel belanja langsung terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar $0,451^2 = 0,203$. Artinya kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijelaskan oleh variabel belanja langsung sebesar 20,3%.

b. Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh t_{hitung} sebesar 5,845 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima dan H_0 ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial belanja tidak langsung berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu secara statistik dapat diterima.

Koefisien korelasi variabel belanja tidak langsung mempunyai nilai positif sebesar 1,681, artinya semakin tinggi belanja tidak langsung maka kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu akan naik dan sebaliknya. Kenaikan belanja tidak langsung sebesar satu rupiah memberikan pengaruh terhadap kenaikan kinerja keuangan sebesar 1,681 persen. Sebaliknya, menurunnya belanja tidak langsung sebesar satu rupiah memberikan pengaruh terhadap turunnya kinerja keuangan sebesar 1,681 persen. Sedangkan besarnya pengaruh variabel belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dengan koefisien determinasi parsial (r^2) yaitu sebesar $0,735^2 = 0,540$. Artinya kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijelaskan oleh variabel belanja tidak langsung sebesar 54%.

c. Hasil Uji Dominan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan adalah variabel belanja tidak langsung karena mempunyai nilai koefisien beta tertinggi (1,040) dibandingkan dengan koefisien beta variabel belanja langsung. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terbukti diterima atau H_3 di terima.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan

Secara deskriptif diketahui bahwa kualitas belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama ini dianggap masih lemah dengan salah satu indikasi belanja langsung selalu lebih besar dari belanja tidak langsung dan penyerapan belanja yang tidak maksimal. Hal ini juga bisa dilihat dari tingkat penyerapan belanja yang relatif rendah terutama untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa yang terkait dengan *public service delivery*. Hal ini kontradiktif dengan penjelasan yang menyebutkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik bersumber dari kualitas APBD yang mencerminkan kehendak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Namun, hal tersebut belum tergambar dari postur APBD yang ideal. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, minimnya belanja infrastruktur, dan tingginya penggunaan sisa lebih perhitungan (SiLPA) anggaran

daerah dari tahun sebelumnya. Jumlah belanja pegawai lebih besar dibanding belanja modal serta barang dan jasa dan jumlahnya semakin membesar. Belanja pegawai ditambah belanja lainnya, yang berarti jumlahnya semakin besar, adalah belanja yang bersifat konsumtif. Pada sisi lain, belanja modal serta belanja barang dan jasa bersifat investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan pengaruhnya positif. Ini berarti semakin besar belanja langsung dan belanja tidak langsung akan mengakibatkan kenaikan kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Semakin besar belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan menggambarkan produktifitas dan efektifitas daerah dalam membelanjakan anggarannya karena kedua variabel tersebut mampu mempengaruhinya. Namun semakin kecil belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan berarti semakin tidak efektif dalam membelanjakan anggarannya karena pengeluaran pemerintah (belanja) terhadap kinerja keuangan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah tersebut dengan anggaran penerimaan.

Hasil ini juga memberikan arti bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung memperlihatkan hasil yang signifikan dengan arah hubungan yang positif pada kinerja keuangan. Ini berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kinerja keuangan akan semakin tinggi. Dari berbagai literatur dapat didefinisikan bahwa belanja langsung dianggap sebagai belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap kinerja keuangan suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian analisis tentang *spending performance* APBD

dalam mendanai pelayanan publik, yang diharapkan mampu memberikan gambaran dan solusi mengenai permasalahan penyerapan belanja daerah dalam APBD, serta mengidentifikasi penetapan belanja APBD yang kurang proporsional antara belanja langsung dan tidak langsung (Kementerian Keuangan RI, 2014).

Efektivitas anggaran pembangunan mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan tersebut, yaitu dengan melihat seberapa besar pemerintah menentukan alokasi nilai belanja untuk kepentingan publik, seberapa besar nilai belanja untuk kepentingan publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan optimal, dan seberapa besar optimalisasi nilai belanja publik mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga menambah kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengalokasikan komponen Belanja Langsung yang berupa Belanja Modal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mengarahkan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong kinerja keuangan di daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian menyusun Belanja Modal sebesar harga beli aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan

1. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ini

berarti semakin besar belanja langsung akan meningkatkan kinerja keuangan. Sebaliknya semakin rendah belanja langsung akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan satuan kerja unit daerah yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Jenis belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dianggarkan untuk kegiatan yang keluarannya tidak menambah aset daerah. Belanja modal dianggarkan untuk kegiatan yang keluarannya menambah aset daerah. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dapat dianggarkan secara sekaligus untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai prestasi kerja yang ditetapkan. Alokasi belanja langsung akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya nilai capaian kegiatan/capaian kinerja instansi pemerintah.

Kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan belanja langsung adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan

suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

2. Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Kinerja keuangan

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ini berarti semakin besar belanja tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan. Sebaliknya semakin rendah belanja tidak langsung akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

3. Pengaruh Variabel Dominan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja tidak langsung merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang pengaruh kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja sulit diukur. Penganggaran belanja tidak langsung mempertimbangkan asas ekonomis, efisien, dan efektif. Jenis belanja yang termasuk dalam belanja tidak langsung terdiri: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja barang dan jasa, belanja tak terduga. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam perhitungan Satuan Anggaran Belanja (SAB) anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus

dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi belanja tidak langsung seperti alokasi belanja pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya nilai capaian kinerja instansi pemerintah.

P E N U T U P

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa belanja tidak langsung merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Saran

1. Pemerintah diharapkan mampu membuka sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan taraf kemandiriannya dan tidak terlalu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer dalam mendanai SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan begitu diharapkan organisasi ini bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran

- terbesar.
3. Untuk lebih mengoptimalkan pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan, maka di sarankan agar proporsi belanja tidak langsung ini lebih di perbesar dalam rangka perataan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
 4. Pengeluaran pembangunan atau belanja

DAFTAR PUSTAKA

- sAnggarini, Yunita dan Puranto, Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ariwibowo, Tungki. (2015). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 11 Edisi Khusus Desember 2015: 335 – 344 336. di akses dari ejurnal.inisri.ac.id>akuntansi>article.
- Arsyad, L. 2017. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: .Edisi keempat. STIE YKPN.
- Asnidar dan Hardi, Novia Sintia. (2019). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 3, No. 1, April 2019. di akses dari www.ejurnalunsam.id>jse>article.
- Astiti, Desak Nyoman Yulia dan Mimba, Ni Putu Sri Harta. (2015). *Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 11. 1 (2015). 1-14. ISSN: 2302-8559. diakses dari www.ojs.unud.ac.id>index.php>Akuntansi>article.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2016). *Pengelolaan Keuangan pelayanan publik lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pasca pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi*. Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dumiary.(2016). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Cetakan Ketiga Penerbit Ghalia Indonesia.
- Faud, R. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Multivarite dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN.
- Haryanto, Hasna Lathifa. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017*. Diponegoro Journal of Accounting Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019. diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Hasan, M. (2017). *Teknik Sampling*. Jakarta: Erlangga
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014), *Laporan Pelaksanaan Spending Performance Dalam Mendanai Pelayanan Publik*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.
- Kuncoro, M. (2017). *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN.
- Mahmudi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

- Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangoesbroto, G. (2014). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BDFE-UGM.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: .ANDI.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. (2017). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Volume 1, Nomor 2 Tahun 2017..
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007
- Sekaran, U. (2016). *Research Methods for Business, Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Terjemahan, Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2015). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. (2017). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo. S. (2017). *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Larela Pustaka Utama.
- Wilantari, Wening. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014*. Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. diakses dari www.eprints.ums.ac.id.
- Yuwono, Indrajaya dan Hariyandi. (2017). *Teknik Sampling*, Jakarta: Erlangga.
- Yuwono, Sony, tengku Agus Indrajaya, Hariyandi (2017). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia.